

Selain perubahan iklim, alih fungsi lahan resapan menjadi permukiman dan daerah industri mengancam sumber air di Jawa.

2030 Krisis Air Ancam Jawa Bali

ATALYA PUSPA
atalya@mediaindonesia.com

KELANGKAAN air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan akan meningkat hingga 2030 mendatang. Proporsi luas wilayah krisis air akan meningkat dari 6,0% pada 2000 menjadi 9,6% di 2045 mendatang.

Hal itu terungkap dari dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Perubahan iklim menjadi salah satu penyebab perubahan neraca air yang semakin defisit dan menimbulkan ancaman krisis air. Ada daerah yang kekeringan, sementara ada juga daerah yang sampai kelebihan air. Neraca air ini harus diseimbangkan," sebut peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Heru Santoso kepada *Media*

Indonesia, kemarin.

Dari hasil risetnya lewat perangkat lunak MAGICC/SCENGEN, keseluruhan wilayah di Jawa bakal mengalami defisit air yang meningkat sampai 2070 nanti. Seiring dengan menyusutnya suplai air, kata Heru, kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan.

Untuk mengantisipasi krisis air di Jawa, Heru menekankan pentingnya membudayakan penghematan air dan menerapkan teknologi penyulingan air dalam memanfaatkan air-air marginal seperti air payau lewat teknologi yang murah.

"Indonesia belum memiliki teknologi tersebut. Sementara di negara-negara Timur Tengah air laut sudah bisa disuling untuk air bersih," ujarnya.

Heru mengungkapkan dampak dari defisit neraca air akan sangat dirasakan oleh daerah yang memiliki penduduk tinggi. Pasalnya, daerah dengan penduduk tinggi akan membutuhkan banyak air bagi rumah tangga, industri, dan pertanian.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan perubahan iklim mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrem, mulai hujan dengan intensitas tinggi hingga kemarau berkepanjangan. Hal tersebut akan berpengaruh pada tata kelola air.

Dalam mengantisipasinya, BMKG mendorong desain ulang tata kelola air di perkotaan. Pasalnya, kata Dwikorita, infrastruktur di perkotaan saat ini, khususnya di wilayah Jakarta, mengacu pada rancangan yang disusun pada 1970 silam.

"Dengan demikian, infrastruktur tersebut tidak memenuhi syarat untuk beradaptasi pada perubahan iklim saat ini," kata Dwikorita dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, kemarin.

Harir Air

Sebagai refleksi perayaan Hari Air Sedunia, kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk beradaptasi dengan alam

dengan mengikuti siklusnya.

"Manusia yang dahulu selalu bisa menaklukkan alam dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kini akibat perubahan alam yang luar biasa ditambah dengan kerusakan alam membuat manusia harus beradaptasi dengan alam," katanya saat menanam Pohon Loa di Taman Maju Bersama (TMB) Gintung, Jagakarsa, Jaksel.

Di masa depan, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih mengemini bahwa masalah kekurangan air, jeleknya kualitas air, dan turunnya daya resap air, semakin besar.

Menurutnya, efek yang merusak air dari suatu pembangunan harus diminimalisasi agar air benar-benar bisa diwariskan ke generasi selanjutnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau Cijung Cidurian Saroni Sugiarto mengatakan salah satu cara menjaga keberlangsungan sumber daya air adalah dengan menanam pohon. (Put/SS/Ifa/H-2)



ANTARA/MOCH ASIM

PERINGATI HARI AIR SEDUNIA: Aktivis lingkungan dari Muhammadiyah Pecinta Alam Semesta (Mupalas) membentangkan poster saat menggelar aksi teatrikal memperingati Hari Air Sedunia di muara Sungai Tambak Wedi, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas temuan limbah dan kandungan fosfat yang tinggi serta mikroplastik di muara Sungai Tambak Wedi.

SEKILAS

100 Ton Kurma dari Arab untuk Ramadan

SAAT menjelang Ramadan, Indonesia kembali menerima hibah 100 ton kurma dan 10 ribu mushaf Alquran cetakan Majma' Malik Fahd dari pemerintah Arab Saudi. Dubes Arab Saudi, Esam Abid Althagafi, menyampaikan hibah kurma itu merupakan tradisi tahunan yang dilakukan negaranya kepada negara-negara muslim, khususnya menjelang Ramadan.

"Indonesia menjadi negara pertama yang menerima hibah ini," kata Esam di Kantor Kemenag, Jakarta kemarin.

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar dan memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Arab Saudi. Lewat Kementerian Agama RI, Esam yakin hibah itu dapat dinikmati oleh muslimin di seluruh Indonesia.

Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi mengapresiasi perhatian dari pemerintah Arab Saudi. Pihaknya berjanji akan segera mendistribusikan hibah tersebut kepada ormas Islam, masjid, hingga musala. "Agar kurma ini dapat dinikmati oleh umat muslim pada bulan Ramadan mendatang," ujarnya. (Van/H-2)

Aksara Terkait Erat dengan Budi Pekerti

AKSARA merupakan unsur paling pokok dari bahasa yang harus dikuasai bukan hanya sebagai alat berkomunikasi, tetapi juga terkait erat dengan pembangunan budi pekerti. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan itu saat membuka Kongres Aksara Jawa (KAJ) di Yogyakarta, secara virtual, kemarin.

Nadiem menyebut pemanfaatan teknologi digital akan membuat kebudayaan lokal mampu mendapatkan pengakuan global. Oleh sebab itu, strategi integrasi aksara Jawa ke platform digital harus dilakukan dengan baik.

Kongres Aksara Jawa (KAJ) I Yogyakarta berlangsung dari 22-26 Maret 2021. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menginginkan bahasa dan aksara Jawa tetap hidup karena dihidupi oleh penuturnya secara aktif dan mampu bangkit kembali dari tidur panjangnya.

Untuk memperbanyak penggunaan aksara Jawa, Sultan mengaku melakukan upaya digitalisasi dan membuat aplikasi baca-tulis aksara Jawa. (AT/H-2)

Banyak Kepala Daerah Abaikan Perpustakaan

INDONESIA memiliki 164.000 perpustakaan, terbanyak kedua setelah India yang memiliki 323.605 perpustakaan. Amat disayangkan karena masih banyak kepala daerah yang tidak menganggap pentingnya keberadaan ratasan perpustakaan itu.

Staf ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, mengungkapkan hal itu saat Rakor-nas bidang Perpustakaan 2021 secara virtual, kemarin.

"Kepala daerah berperan atas kesadaran pentingnya perpustakaan. Budaya literasi tidak bisa ditawar guna menjawab tantangan peningkatan sumber daya manusia sehingga dukungan penuh dari APBD dan peningkatan kualitas SDM sangat mutlak," tegas Suhajar.

Saat ini, bebarnya, baru 33 daerah yang sudah membentuk kelembagaan perpustakaan setingkat dinas. Sebanyak

23 daerah belum memiliki perpustakaan dan 458 daerah masih menggabungkan perpustakaan dengan lembaga lainnya.

"Seharusnya, kelembagaan perpustakaan berdiri sendiri. Sebab ketika kelembagaan masih digabung, penganggaran terkait literasi juga akan terbagi," ujarnya.

Dalam APBD 2020, dukungan APBD bagi pembangunan perpustakaan daerah dalam

meningkatkan literasi dan kegemaran membaca hanya berkisar 0,22%, turun jika dibanding dengan 2018 yang sebesar 0,27%.

Dalam mengatasi minimnya anggaran dan kekurangan SDM, Suhajar meminta agar perpustakaan daerah membangun kerja sama dengan berbagai lembaga.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perbukuan

Kemendikbud Totok Suprayitno ikut menyoroti perpustakaan sekolah yang justru difungsikan seperti gudang penyimpanan buku.

Pada 2020, diketahui bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia mencapai 55,74% di level sedang. Angka itu sedikit naik jika dibandingkan 2019 yang sebesar 53,84%. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyam-

paikan persoalan mendasar mengapa budaya membaca kita rendah ialah rendahnya rasio jumlah penduduk dan buku yang beredar. "Rasionya 0,09. Itu artinya, satu buku ditunggu oleh 90 orang sehingga menjadi persoalan," lanjutnya.

Idealnya, menurut UNESCO, angka ketersediaan buku minimal 3 buku untuk setiap orang dalam setiap tahunnya. (Fer/H-2)



ANTARA/ALYSIUS JAROT NUGROHO

PENGECATAN MAKAM DI KLATEN: Warga mengecat batu nisan di Permakaman Gedhong Sasono Palereman, Jetis, Bakungan, Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, kemarin. Selain agar terlihat rapi dan menghilangkan suasana menyeramkan, pengecatan pada batu nisan oleh warga setempat tersebut untuk menyambut tradisi Sadranan menjelang bulan Ramadan.

MPI

PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Millennium Pharmacon International Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan dalam sedikdiknya 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia e-RUPS dan situs web Perseroan, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

- Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2021 pukul 16.00 WIB;
- Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 April 2021 pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam mata acara Rapat, harus memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto POJK 15/2020; merupakan usulan pemegang saham yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan disampaikan paling lambat 7 hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 dan POJK no. 15/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST & RUPSLB.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST & RUPSLB sejak tanggal Pemanggilan RUPST & RUPSLB sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPST & RUPSLB yakni tanggal 28 April 2021.

Jakarta, 23 Maret 2021
PT Millennium Pharmacon International Tbk
Direksi

Mediaindonesia.com
Hadir dengan opini cerdas dan terverifikasi.
Mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda.

FAKTA BOLEH SAMA,
OPINI BISA BEDA.
TEMUKAN PANDANGAN BERBEDA
HANYA DI MEDIAINDONESIA.COM

Unduh Aplikasi Media Indonesia di Android